

## **BAB II**

### **TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

#### **A. Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan oleh Tjondro dan Wilopo (2011) tentang Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Profitabilitas dan Kinerja Perusahaan. Objek penelitian ini adalah Perusahaan Perbankan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008. Penelitian tersebut menggunakan teknis analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian membuktikan variabel independen yang digunakan yaitu GCG berpengaruh signifikan terhadap ROA, ROE, NIM dan PER, sedangkan GCG berpengaruh tidak signifikan terhadap *Return* perusahaan.

Tertius dan Christiawan (2015) tentang *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Sektor Keuangan. Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi linier Berganda. Hasil penelitian menunjukkan secara simultan dewan komisaris, komisaris independen, kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan mempengaruhi ROA. Secara parsial dewan komisaris dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap ROA. Sedangkan komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA.

Ferdyant *et al.* (2014) menguji tentang Pengaruh Kualitas Penerapan *Good Corporate Governance* dan Resiko Pembiayaan Terhadap Profitabilitas. Objek penelitian ini adalah Perusahaan Perbankan Syariah 2010-2013. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linier berganda.

Hasil penelitian membuktikan Kualitas Penerapan GCG dan resiko Pembiayaan berpengaruh positif profitabilitas perusahaan.

Hartono dan Nugrahanti (2014) menguji tentang Pengaruh Mekanisme *Good Governance* Kinerja Keuangan. Objek penelitian ini adalah Perusahaan Perbankan yang *go public* tahun 2011-2013. Penggunaan teknik analisis dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian membuktikan dewan direksi memiliki efek positif terhadap kinerja keuangan bank. Kepemilikan institusional memiliki efek negatif terhadap kinerja bank, namun kepemilikan manajemen, dewan komisaris independen dan komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja bank.

Wulandari (2006) menguji tentang pengaruh Indikator *Good Corporate Governance* Terhadap kinerja perusahaan publik. Objek penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar BEI tahun 2000-2002. Penggunaan teknik analisis dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian membuktikan indikator mekanisme corporate governance internal, hanya Dept to Equity yang signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, sedangkan dewan direktur, proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan institusional tidak signifikan tidak signifikan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

## **B. Teori dan Kajian Pustaka**

### **1. Agency Theory**

Terjadinya hubungan keagenan dikarenakan ketika suatu individu yang disebut sebagai prinsipal menyewa individu atau organisasi lain, yang

disebut sebagai agen, untuk melakukan sejumlah jasa dan mendelegasikan kewenangan untuk membuat keputusan kepada agen tersebut (Brigham dan Houston, 2006). Menurut Jensen dan Meckling (1976); Wiranata dan Nugrahanti (2013) Pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan mendorong manajer untuk tidak memaksimalkan usahanya, sementara penyebab konflik antara manajer dan pemegang saham diantaranya adalah pembuatan keputusan yang berkaitan dengan aktivitas pencarian dana dan bagaimana dana yang diperoleh tersebut diinvestasikan. Wulandari (2011); Wiranata dan Nugrahanti (2013) dalam konteks perusahaan, investor menghadapi masalah keagenan mengacu kepada kesulitan investor untuk memastikan bahwa dananya tidak disalah gunakan oleh manajemen perusahaan untuk mendanai kegiatan yang tidak menguntungkan.

## **2. Perbankan Syariah**

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (UU No. 21 Tahun 2008).

Dalam UU No. 21 Tahun 2008 dijelaskan bahwa Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan, Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan

prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/unit syariah. Terdapat beberapa kegiatan usaha pada Bank Umum Syariah yang dinyatakan dalam UU No. 21 Tahun 2008, yaitu:

- a. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah*.
- b. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah*;
- c. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*;
- d. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna'*;
- e. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh*;
- f. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- g. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah*;
- h. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
- i. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan

prinsip syariah, antara lain, seperti akad ijarah, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*;

- j. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- k. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;
- l. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah;
- m. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah;
- n. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah;
- o. Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad *wakalah*;
- p. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah; dan
- q. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan pada dasarnya diperlukan sebagai alat untuk mengukur kesehatan (*financial health*) perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan digunakan sebagai media pengukuran subyektif yang

mengambarkan efektifitas penggunaan aset oleh sebuah perusahaan dalam mengoperasikan bisnis dan meningkatkan laba. Kinerja keuangan yang maksimal dapat diperoleh dengan adanya fungsi yang benar dalam pengelolaan perusahaan. Oleh karena itu, *corporate governance* berperan penting dalam optimalisasi kinerja keuangan. Kinerja bank yang baik dapat dilihat dari tingkat kesehatan bank tersebut atau dapat dikatakan kedua hal itu saling berkaitan.

Ukuran untuk melakukan penilaian kinerja keuangan telah ditentukan oleh Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.30/11/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 dan surat keputusan Direksi Bank Indonesia No.30/11/KEP/DIR tanggal 19 maret 1998 tentang Tatacara Penilaian Kesehatan Bank Umum. Dalam rangka mendorong terciptanya sistem perbankan yang sehat, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku, maka diperlukan pelaksanaan *corporate governance* di industri perbankan. Oleh karena itu, Bank Indonesia melaksanakan seleksi dalam bentuk uji kemampuan dan kepatuhan (*fit and proper test*) terhadap calon dewan komisaris, dewan direksi dan pemegang saham pengendali, karena pihak-pihak tersebut mempunyai pengaruh besar dalam pengendalian dan pengelolaan bank.

Pada dasarnya tujuan dari pengukuran kinerja perbankan syariah tidaklah jauh berbeda dengan kinerja perusahaan pada umumnya. Pengukuran kinerja perusahaan dilakukan untuk melakukan perbaikan dan

pengendalian atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Penilaian kinerja bank sangat penting untuk setiap *stakeholders* bank yaitu manajemen bank, nasabah, mitra bisnis dan pemerintah di dalam pasar keuangan yang kompetitif. Bank yang dapat selalu menjaga kinerjanya dengan baik terutama tingkat profitabilitasnya yang tinggi dan mampu membagikan deviden dengan baik serta prospek usahanya dapat selalu berkembang dan dapat memenuhi ketentuan (*prudential banking regulation*) dengan baik, maka ada kemungkinan nilai sahamnya dan jumlah dana pihak ketiga akan naik. Kenaikan nilai saham dan jumlah dana pihak ketiga ini merupakan salah satu indikator naiknya kepercayaan masyarakat kepada bank yang bersangkutan.

Metode penilaian baru tersebut ditetapkan melalui peraturan BI (PBI) No. 9 Tahun 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, yang meliputi sebagai berikut:

**a. Kualitas Aset (*Asset Quality*)**

Penilaian kualitas aset dimaksudkan untuk menilai kondisi aset bank, termasukantisipasi atas risiko gagal bayar dari pembiayaan (*credit risk*) yang akan muncul. Penilaian kualitas aset ini dilakukan dengan dua cara yaitu melalui kualitas aktiva produktif (KAP) dan pembiayaan *Non-Performing Financing* (NPF). *Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh bank. Semakin tinggi nilai rasio ini menggambarkan kualitas pembiayaan bank semakin buruk.

Rasio NPF dirumuskan sebagai berikut:

$$NPF\ GROSS = \frac{Pembiayaan\ Kurang\ Lancar,\ Diragukan,\ Macet}{Total\ Pembiayaan}$$

#### **b. Likuiditas**

Penilaian likuiditas dimaksudkan untuk menilai kemampuan bank dalam memelihara tingkat likuiditas yang memadai termasuk antisipasi atas risiko likuiditas yang akan muncul. Penilaian likuiditas dilakukan dengan tiga cara yaitu melalui rasio *Short Term Mismatch (STM)*, *Short Term Mismatch Plus (STMP)*, dan Rasio Antar Bank Pasiva (RABP).

#### **c. Rentabilitas (*Earning*)**

Penilaian rentabilitas dimaksudkan untuk menilai kemampuan bank syariah dalam menghasilkan laba. Penilaian rentabilitas ini dilakukan dengan enam cara yaitu melalui *Net Operating Margin (NOM)*, *Return on Assets (ROA)*, Rasio Efisiensi Kegiatan Operasional (REO), Deversifikasi Pendapatan (DP), *Return on Equity (ROE)*, dan Komposisi Penempatan Dana pada Surat Berharga (IdFR).

##### **1) *Return On Assets***

Kinerja perbankan syariah dalam penelitian ini diukur dengan *Return On Asset (ROA)* dan *Return On Equity (ROE)*. Menurut (2009) *ROA* adalah rasio laba sebelum bunga dan pajak (*EBIT*) atau laba bersih dibagi dengan nilai buku aset di awal tahun fiskal. *Return on Asset* mengukur laba perusahaan yang berhubungan dengan semua sumber daya disposal (modal pemegang saham ditambah dana jangka pendek dan panjang yang dipinjam). *ROA* mengukur



bagaimana tingkat keuntungan perusahaan berhubungan terhadap total aset. *ROA* memberikan ide mengenai bagaimana manajemen yang efisien menggunakan aset-asetnya untuk menghasilkan laba. *Return On Assets (ROA)* adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba sebelum pajak berdasarkan total aset yang dimiliki (Hanafi dan Halim, 2016).

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

Semakin kecil rasio maka mengidentifikasikan kurangnya kemampuan manajemen bank dalam hal mengelola aset untuk meningkatkan pendapatan dan atau menekan biaya.

**d. Permodalan (*Capital*)**

Penilaian terhadap faktor permodalan mencakup: a) kecukupan, proyeksi (*trend* ke depan) permodalan dan kemampuan permodalan dalam *mengcover* risiko; b) kemampuan memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan, rencana permodalan untuk mendukung pertumbuhan usaha, akses kepada sumber ermodalan dan kinerja keuangan pemegang saham. pengukuran faktor permodalan diukur menggunakan rasio *Capital Adequacy Ratio (CAR)* adalah rasio kewajiban pemenuhan modal minimum yang harus dimiliki oleh bank. Nilai minimal CAR sebesar 8% dari Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR), atau ditambah dengan Resiko Pasar dan Resiko Operasional tergantung pada kondisi bank yang bersangkutan/standar internasional

yang dikeluarkan oleh *Bank for International Settlement*. Adapun Rumus CAR sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Resiko}}$$

Semakin tinggi nilai CAR maka menggambarkan semakin baik kemampuan bank untuk menanggung dari resiko dari setiap kredit atau aktiva produktif yang beresiko.

**e. Manajemen (*Management*)**

Penilaian terhadap faktor Manajemen meliputi: a) kualitas manajemen umum, penerapan manajemen resiko terutama pemahaman mengenai manajemen bank dan UUS; b) Kepatuhan Bank atau UUS terhadap ketentuan yang berlaku, komitmen kepada Bank Indonesia maupun pihak lain, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah termasuk edukasi pada masyarakat, pelaksanaan fungsi sosial.

**f. Sensitivitas terhadap resiko pasar (*Sensitivity to market risk*)**

Penilaian terhadap faktor Sensitivitas terhadap resiko pasar meliputi: a) Kemampuan modal bank atau UUS *mengcover* potensi kerugian sebagai akibat fluktuasi(*adverse movement*) nilai tukar; b) Kecukupan penerapan manajemen resiko pasar.

**4. Good Governance Business Syariah (GGBS)**

GGBS merupakan suatu pedoman tata kelola bisnis yang berlandaskan kaidah–kaidah syariah dan berorientasi pada keberhasilan materi dan spritual (Jumansyah dan Syafei, 2013)

Bisnis yang beroperasi dengan *governance* yang sehat akan mempunyai peluang untuk bertahan secara berkelanjutan dan berpotensi untuk berkembang. Menurut KNKG (2011) kemampuan untuk menjaga keberlangsungan bisnis sangat penting untuk dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Mendorong praktik bisnis syariah yang kuat dan sehat secara finansial dan senantiasa prinsip syariah, maka lembaga bisnis syariah menyediakan prinsip-prinsip dalam penerapannya yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran dan kesetaraan (KNKG, 2011).

#### 5. Mekanisme *Good Governance Business Syariah* (GGBS)

Mekanisme adalah suatu aturan, prosedur dan cara kerja yang harus ditempuh untuk mencapai kondisi tertentu, mekanisme *Corporate Governance* merupakan suatu mekanisme berdasarkan pada aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak-pihak yang ada dalam suatu perusahaan untuk menjalankan peran dan tugasnya.

Struktur mempunyai peran yang sangat fundamental dalam implementasi mekanisme *Corporate Governance*, struktur merupakan kerangka dasar tempat diletakkannya sistem dalam penyusunan mekanisme *Corporate Governance* perusahaan. Struktur *Corporate Governance* berperan sebagai kerangka dasar manajemen perusahaan yang menjadi dasar pendistribusian hak-hak dan tanggung jawab diantara organ-organ perusahaan (dewan komisaris, direksi, dan RUPS/pemegang saham) dan *Stakeholder* lainnya, serta aturan-aturan maupun prosedur pengambilan

keputusan dalam hubungan perusahaan. Dalam KNKG (2011) *Mekanisme Corporate Governance*, terdiri dari:

**a. Rapat Umum Pemegang Saham**

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perusahaan yang merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundangan. Keputusan yang diambil dalam RUPS harus didasarkan pada kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang. RUPS dan atau pemegang saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan haknya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundangan, termasuk untuk melakukan penggantian atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.

**1) Pedoman Pokok Pelaksanaan**

- a) Pengambilan keputusan RUPS harus dilakukan secara wajar dan transparan dengan memperhatikan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang.
- b) RUPS harus diselenggarakan sesuai dengan kepentingan perusahaan dan dengan memperhatikan anggaran dasar dan

peraturan perundangan, serta dengan persiapan yang memadai, sehingga dapat mengambil keputusan yang sah.

c) Penyelenggaraan RUPS merupakan tanggung jawab Direksi.

Untuk itu, Direksi harus mempersiapkan dan menyelenggarakan RUPS dengan baik dan dengan berpedoman pada butir 1 dan 2 diatas. Dalam hal Direksi berhalangan, maka penyelenggaraan RUPS dilakukan oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham sesuai dengan peraturan perundangan dan anggaran dasar perusahaan.

d) RUPS dapat juga dilakukan melalui media tele-konferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan seluruh peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. RUPS dapat pula dilakukan melalui sirkulasi dengan catatan semua pemegang saham ikut menandatangani.

**b. Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, adalah organperseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direktur (Effendi, 2016). Sedangkan Dewan Komisaris menurut KNKG (2011) adalah organ perusahaan bertugas, bertanggungjawab secara kolektif dalam melakukan pengawasan, dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan

bahwa Perusahaan melakukan GGBS. Dalam komposisi, pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris (KNKG, 2011):

- 1) Jumlah anggota Dewan Komisaris harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan.
- 2) Dewan Komisaris dapat terdiri dari Komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi yang dikenal sebagai Komisaris Independen dan komisaris yang terafiliasi. Maksud terafiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan perusahaan itu sendiri.
- 3) Jumlah Komisaris Independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundangan.
- 4) Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS melalui proses yang transparan.
- 5) Pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS berdasarkan alasan yang wajar dan setelah kepada anggota Dewan Komisaris diberi kesempatan untuk membela diri.

Menurut Pasal 120 ayat (2) UU PT Terkait dengan pelaksanaan GCG, tugas dan tanggung jawab dewan komisaris meliputi aspek-aspek berikut:

- 1) Menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan.

- 2) Mengawasi perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan yang lain.
- 3) Dingungkannya transaksi yang mengandung konflik kepentingan secara wajar dan adil.
- 4) Memastikan kepatuhan perusahaan pada peraturan perundang-perundangan dan peraturan yang berlaku.
- 5) Menjamin akuntabilitas organ perseroan.

Melakukan pengawasan kebijakan terhadap kebijakan direksi dalam pengelolaan perusahaan, sehingga prinsip kewajaran dan kesetaraan terpenuhi.

#### **c. Dewan Direksi**

Menurut Pasal 1 dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar (Effendi, 2016). Tugas dan tanggung jawab direksi diatur dalam Pasal 19 dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang penerapan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik pada BUMN adalah sebagai berikut (Effendi, 2016):

- 1) Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan itikad baik sesuai dengan kepentingan, maksud dan tujuan BUMN.
- 2) Memastikan agar BUMN melaksanakan tanggung jawab sosialnya.

- 3) Memperhatikan kepentingan dari pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Salah seorang direksi ditunjuk oleh rapat direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan GCG di BUMN yang bersangkutan.
- 5) Direksi harus mampu menyampaikan informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan dewan komisaris, termasuk rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku, serta gaji, fasilitas dan/tunjangan lain yang diterima BUMN yang bersangkutan untuk dimuat dalam laporan tahunan BUMN.
- 6) Direksi wajib melaporkan kepada BUMN mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarga (istri/suami dan anak-anaknya) pada BUMN yang bersangkutan dan perusahaan lain, termasuk perubahannya.

Sedangkan Komposisi Direksi dalam pelaksanaan GGBS menurut (KNKG, 2011):

- a. Jumlah anggota Direksi harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan.
- b. Anggota Direksi dipilih dan diberhentikan oleh RUPS melalui proses yang transparan.



- c. Pemberhentian anggota Direksi dilakukan oleh RUPS berdasarkan alasan yang wajar dan setelah kepada yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
- d. Seluruh anggota Direksi harus berdomisili di Indonesia, di tempat yang memungkinkan pelaksanaan tugas pengelolaan perusahaan sehari-hari.

#### **d. Dewan Pengawas Syariah**

Menurut KNKG (2011) Entitas syariah dan Perusahaan yang mencantumkan dalam anggaran dasarnya untuk juga menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, selain mempunyai Dewan Komsaris harus mempunyai Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI). Agar pelaksanaan DPS berjalan secara efektif, maka perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut (KNKG, 2011):

- 1) Komposisi DPS harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat, cepat, independen, mengedepankan aspek kehati-hatian dan sadar resiko (*Prudent and risk awareness*) dan sesuai prinsip syariah.
- 2) Anggota DPS harus mempunyai integritas dan kompetensi fiqh muamalah dan bidang bisnis yang terkait tugasnya.
- 3) DPS harus menjalankan fungsinya secara profesional.
- 4) DPS memiliki fungsi pengawasan dan pemberi nasihat, yang mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, ulasan pemberhentian

kegiatan untuk sementara apabila ada indikasi penyimpangan terhadap prinsip syariah.

DPS bertugas memberikan nasihat kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perusahaan atau unit syariah. Maka dari itu DPS harus (KNKG, 2011):

- 1) Menyusun pola hubungan antara DPS, Dewan Komisaris dan Direksi yang disetujui oleh para pihak.
- 2) Memperkaya pengetahuan syariah kepada anggota Dewan Komisaris Direksi dan karyawan perusahaan.
- 3) Memberikan pernyataan bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha perusahaan sesuai atau menyimpang dari prinsip syariah dalam laporan oerasional perusahaan kepada regulator.
- 4) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada RUPS pada saat yang bersamaan dengan laporan Direksi.

**e. Komite Penunjang Dewan Komisaris**

**1) Komite Audit**

- a) Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa: (a) laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, (b) struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, (c) pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, termasuk pemenuhan kepatuhan

kepada prinsip-prinsip syariah (*sharia compliance*), dan (d) tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen;

- b) Komite Audit memproses calon auditor eksternal termasuk imbalan jasanya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris;
- c) Jumlah anggota Komite Audit harus disesuaikan dengan kompleksitas Perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan. Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen dan anggotanya dapat terdiri dari Komisaris dan atau pelaku profesi dari luar perusahaan. Salah seorang anggota memiliki latar belakang dan kemampuan akuntansi dan atau keuangan.
- d) Keberadaan dan keanggotaan Komite Audit tata kerjanya dilaporkan dalam RUPS.

## **2) Komite Nominasi dan Remunerasi**

- a) Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas membantu Dewan Komisaris dalam menetapkan kriteria pemilihan calon anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Direksi serta sistem remunerasinya;

- b) Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas membantu Dewan Komisaris mempersiapkan calon anggota Dewan Komisaris, DPS dan Direksi serta mengusulkan besaran remunerasinya. Dewan Komisaris dapat mengajukan calon tersebut dan remunerasinya untuk memperoleh keputusan RUPS dengan cara sesuai ketentuan Anggaran Dasar;
- c) Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, Komite Nominasi dan Remunerasi diketuai oleh Komisaris Independen dan anggotanya dapat terdiri dari Komisaris dan atau pelaku profesi dari luar perusahaan;

### **3) Komite Kebijakan Risiko**

- a) Komite Kebijakan Risiko bertugas membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji sistem manajemen risiko yang disusun oleh Direksi serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh perusahaan, termasuk risiko kepatuhan terhadap prinsip syariah;
- b) Anggota Komite Kebijakan Risiko terdiri dari anggota Dewan Komisaris, namun bilamana perlu dapat juga menunjuk pelaku profesi dari luar perusahaan.

#### 4) Komite Kebijakan Governance Bisnis Syariah

- a) Komite Kebijakan Governance Bisnis Syariah bertugas membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji kebijakan GGBS secara menyeluruh yang disusun oleh Direksi serta menilai konsistensi penerapannya, termasuk yang bertalian dengan etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*);
- b) Anggota Komite Kebijakan Governance Bisnis Syariah terdiri dari anggota Dewan Komisaris, namun bilamana perlu dapat juga menunjuk pelaku profesi dari luar perusahaan;
- c) Bila dipandang perlu, Komite Kebijakan Governance Bisnis Syariah dapat digabung dengan Komite Nominasi dan Remunerasi.

Masing-masing komite harus memiliki tata tertib dan pedoman kerja (*Committee Charter*) sehingga pelaksanaan tugasnya dapat terarah dan efektif serta dapat digunakan sebagai salah satu alat penilaian kinerja.

### C. Perumusan Hipotesis

#### 1. Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Keuangan

Perspektif fungsi *resource dependence* dari dewan komisaris yang dikemukakan oleh Pfeffer (1973); Young, *et al.* (2001); Darwis (2009) memandang dewan sebagai suatu alat untuk mendapatkan informasi dan sumber daya yang penting. Hal tersebut dinilai dapat menciptakan keuntungan setiap perusahaan. Adanya asumsi bahwa dewan komisaris akan menguntungkan bagi perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan (Darwis, 2009). Fungsi pengawasan yang dilakukan dewan komisaris meminimalkan tindakan oportunistik yang dilakukan oleh direksi atau

manajer sehingga kinerja yang dihasilkan sesuai dengan kepentingan pemegang saham.

Komposisi dewan komisaris mencerminkan efektivitas fungsi pengawasan (Darwis, 2009). Kinerja atau nilai yang baik tidak tercapai apabila penerapan GCG kurang baik, oleh karena itu keberadaan dan proporsi komisaris dalam mengawasi jajaran manajer maupun direksi terkait pengurusan perusahaan yang berimplikasi pada nilai perusahaan dapat tercapai dengan baik. Pernyataan tersebut didukung penelitian yang dilakukan oleh Tertius dan Christiawan (2015) yang membuktikan dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja perusahaan sektor keuangan. Dewayanto (2010) membuktikan ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja perbankan. Widyati (2013) Membuktikan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

H1: Dewan Komisaris berpengaruh terhadap *Return On Assets* (ROA) Perbankan Syariah.

H2: Dewan Komisaris berpengaruh terhadap *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Perbankan Syariah.

H3: Dewan Komisaris berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Perbankan Syariah.

## **2. Pengaruh Dewan Direksi Terhadap Kinerja Keuangan**

Kesuksesan penerapan *Good Corporate Governance* salah satunya ditentukan kinerja dewan direksi di perusahaan dalam membuat kebijakan

maupun strategi bisnis. Semakin besar jumlah dewan direksi semakin besar pula kemungkinan perusahaan mencapai strategi yang akan digunakan. Keberhasilan penerapan strategi yang baik mempengaruhi laba perusahaan (Aditya, 2016). Siallagan & Machfoedz (2006); Wardoyo dan Veronica (2013) kesalahan dalam pembuatan keputusan para pemakai seperti investor dan kreditor disebabkan karena rendahnya kualitas laba, sehingga nilai perusahaan akan berkurang. Bertambahnya laba perusahaan akan mempengaruhi nilai perubahan ekuitas perusahaan dan menambah nilai ekuitas, sehingga perusahaan semakin baik dalam mengcover resiko pembiayaan yang dialami perbankan syariah.

Pernyataan tersebut didukung penelitian yang dilakukan oleh Hartono dan Nugrahanti (2014) yang membuktikan bahwa Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan. Ningtyas *et al.* (2014) membuktikan bahwa dewan direksi berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan JII. Eksandy (2018) membuktikan dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.

H4: Dewan Direksi berpengaruh terhadap *Return On Assets* (ROA)

Perbankan Syariah.

H5: Dewan Direksi berpengaruh terhadap *Capital Adequacy Ratio*

(CAR) Perbankan Syariah.

H6: Dewan Direksi berpengaruh terhadap *Non Performing Financing*

(NPF) Perbankan Syariah.

### 3. Pengaruh Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Keuangan

Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada dasarnya sama dengan Dewan Komisaris yaitu melakukan pengawasan pada jajaran direksi, tetapi DPS melakukan pengawasan mengenai operasional yang berkaitan dengan syariah pada perbankan syariah. Hal tersebut terletak pada akad perbankan syariah, dimana pengawasan yang maksimal perlu dilakukan terhadap akad terhadap akad terutama pembiayaan karena sumber pendapatan utama perbankan syariah salah satunya dari akad pembiayaan. Adanya pengawasan tersebut perbankan syariah dapat meminimalkan resiko terjadinya pembiayaan macet yang mengakibatkan laba dan nilai ekuitas perusahaan berkurang.

Proporsi anggota Dewan Pengawas Syariah akan meningkatkan pengawasan yang lebih profesional terhadap kinerja pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga kinerja dari bank terarah dengan baik yang berimplikasi pada nilai perusahaan. Adanya pengawasan yang baik dari DPS merupakan langkah baik dalam menerapkan GCG sehingga meningkatkan nilai dan kepercayaan publik terhadap suatu bisnis. Hal tersebut didukung oleh Prasetyoningrum (2010) profesionalisme DPS berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja BPRS, Prastiwi (2017) membuktikan independensi DPS berpengaruh signifikan terhadap kinerja pada BMT di kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar. Nurhikmah *et al.* (2018) membuktikan DPS berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Berdasarkan uraian diatas dapat dihipotesiskan



H7: Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap *Return On Assets*

(ROA) Perbankan Syariah.

H8: Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap *Capital Adequacy*

*Ratio* (CAR) Perbankan Syariah.

H9: Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap *Non Performing*

*Financing* (NPF) Perbankan Syariah.

#### **4. Pengaruh Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan**

Komite Audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memonitoring proses pelaporan keuangan oleh manajemen untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, komite menyediakan komunikasi formal antara dewan komisaris, auditor eksternal dan internal. Peran komite audit sangat penting karena mempengaruhi kualitas laba perusahaan yang merupakan salah satu informasi penting dimana akan digunakan oleh investor menilai suatu kinerja perusahaan. Kualitas laba yang baik menggambarkan pengelolaan resiko pembiayaan semakin membaik karena nilai ekuitas perbankan syariah semakin bertambah untuk mengantisipasi resiko pembiayaan macet. Ketepatan penerapan jumlah Komite audit maka semakin baik dalam melakukan monitoring proses pelaporan keuangan, sehingga tindak kecurangan dalam proses pemantauan dapat diminimalisir

Farida *et al.* (2010) membuktikan bahwa komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan. Widyati (2013) Membuktikan bahwa jumlah komite audit berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja

keuangan. Manik (2011) membuktikan komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan *Property and real Estate*.

H10: Komite audit berpengaruh terhadap *Return On Assets* (ROA)

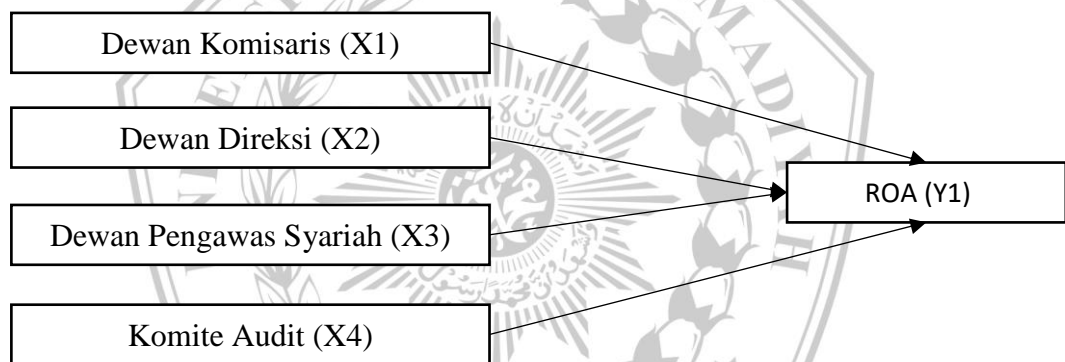
Perbankan Syariah.

H11: Komite audit berpengaruh terhadap *Capital adequacy Ratio* (CAR)

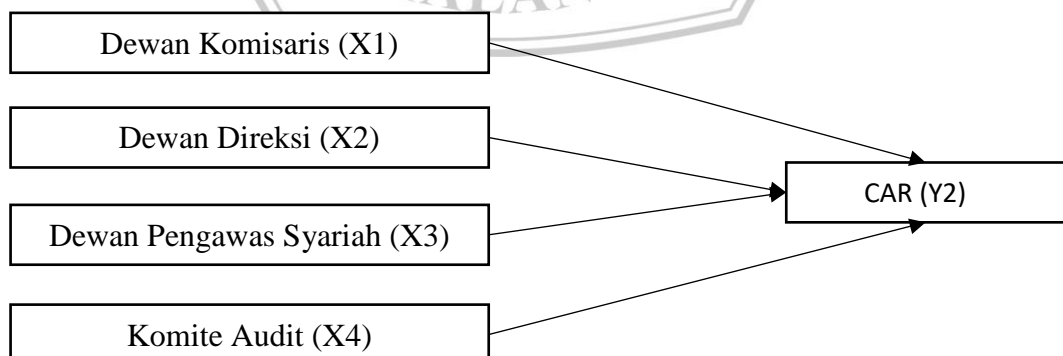
Perbankan Syariah.

H12: Komite audit berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (CAR) Perbankan Syariah.

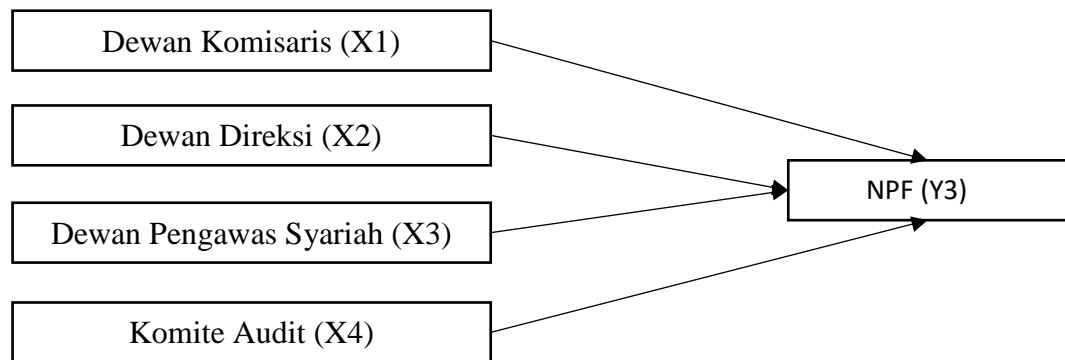
#### A. Kerangka Konseptual



**Gambar 2.1**  
**Model Penelitian ke ROA**



**Gambar 2.2**  
**Model Penelitian ke CAR**



**Gambar 2.3**  
**Model Penelitian ke NPF**

